

ANALISIS PERBANDINGAN STANDAR AKUNTANSI DI NEGARA UNI EMIRAT ARAB DAN INDONESIA

Natalis Christian, Charline Marshella Ong, Jillian Veronica Wisely, Jaslyn, Joan

Universitas Internasional Batam, Indonesia

*Corresponding Author:
Natalis Christian

Abstract

This research aims to conduct a comprehensive analysis of the comparison of accounting standards between the United Arab Emirates and Indonesia in the context of international trade. This comparison is important for understanding differences in accounting practices between two countries that have profoundly different economic, social, and cultural backgrounds. This article reviews the evolution, implementation, and impact of accounting standards in the UAE and Indonesia over the recent period and highlights the factors that influence financial reporting and information disclosure. In the UAE, the full adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) has shifted the paradigm in accounting practices, leading to increased transparency and international investor confidence. Meanwhile, Indonesia has also taken similar steps with convergence to IFRS as a Financial Accounting Standard, starting in 2012, although challenges in implementation are still a major concern. In-depth analysis of this comparison covers regulatory aspects, financial reporting practices, and adaptation to local economic and business conditions. Both countries face unique challenges in implementing international accounting standards, which are reflected in their approaches to regulatory settings and the implementation of accounting practices. This research contributes to exploring the impact of these differences on financial statement quality, information transparency, as well as compliance with applicable accounting standards.

Keywords: Accounting Standards; International Comparison; United Arab Emirates; Indonesia; International Financial Reporting Standards

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ekonomi saat ini, standar akuntansi internasional, khususnya International Financial Reporting Standards (IFRS), telah menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan di seluruh dunia. Adopsi dan implementasi IFRS di berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia, mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan praktik akuntansi dengan standar yang diakui secara internasional, dengan tujuan utama memudahkan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor global.

Landasan Utama dalam Akuntansi Internasional IFRS, yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), bukan hanya sekedar seperangkat aturan akuntansi. Standar ini dirancang untuk menciptakan konsistensi, transparansi, dan kejelasan dalam pelaporan keuangan entitas bisnis di seluruh dunia. Keberadaan IFRS membantu mengurangi keragaman dalam praktik akuntansi antar negara, memungkinkan perbandingan yang lebih mudah dan relevansi informasi keuangan untuk keputusan investasi global.

Implementasi IFRS di UEA telah mengadopsi IFRS sebagai kerangka utama dalam penyusunan laporan keuangan sejak awal abad ke-21. Proses adopsi ini, yang dilakukan secara progresif, telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam integritas laporan keuangan di UEA.

Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan transparansi dalam praktik akuntansi, tetapi juga memperkuat posisi UEA sebagai pusat keuangan global yang menarik bagi investasi asing. Studi yang dilakukan oleh (Nguyen et al., 2023) menunjukkan bahwa implementasi IFRS telah berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan di negara tersebut, memperkuat kepercayaan investor dan memfasilitasi perdagangan internasional.

Di sisi lain, Indonesia memulai proses konvergensi ke IFRS sejak tahun 2012 dengan mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang secara bertahap disesuaikan dengan IFRS. Langkah ini diambil untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan nasional sesuai dengan standar internasional yang lebih dikenal. Meskipun proses ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti kompleksitas regulasi dan adaptasi terhadap struktur ekonomi dan bisnis lokal, upaya konvergensi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar modal Indonesia (Yuesti & Saitri, 2021)

Perbedaan standar akuntansi dalam penelitian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan regulasi, praktik pelaporan keuangan, dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi masing-masing negara. UEA, dengan pendekatan yang progresif dan fokus pada integrasi internasional, berhasil mengintegrasikan IFRS ke dalam praktik akuntansi mereka dengan efektif. Di sisi lain, Indonesia mengalami tantangan dalam menyesuaikan regulasi dan memfasilitasi transisi yang komprehensif ke standar internasional, meskipun langkah-langkah menuju hal tersebut telah dilakukan secara konsisten.

Reformasi akuntansi di sektor publik dan swasta di Indonesia mencerminkan upaya serius untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan di negara ini. Di sektor publik, langkah-langkah menuju penerapan akuntansi akrual telah menjadi agenda utama. Penerapan akuntansi akrual di sektor publik diharapkan dapat mengatasi kelemahan sistem kas yang cenderung kurang transparan dan rentan terhadap manipulasi. Dengan mencatat pendapatan dan biaya secara tepat waktu, pemerintah dapat memberikan informasi keuangan yang lebih terpercaya kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Ini juga membantu dalam perencanaan anggaran yang lebih efektif serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan publik.

Di sisi lain, dalam sektor swasta, pentingnya kemampuan manajerial untuk menghasilkan laba berkualitas juga menjadi fokus. Menurut Edi dan Santi Yopie (2019), manajemen yang efektif dalam mengelola operasi dan strategi bisnis merupakan kunci untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi semakin penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Adanya informasi lingkungan juga menjadi aspek penting dalam praktek tata kelola perusahaan yang baik. Itan et al. (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam strategi bisnis mereka cenderung lebih dipercaya oleh pasar dan lebih baik dalam menjawab tuntutan dari para pemangku kepentingan terkait keberlanjutan.

Secara keseluruhan, reformasi akuntansi di Indonesia tidak hanya berfokus pada konvergensi dengan standar internasional seperti IFRS di sektor swasta, tetapi juga mencakup perbaikan dalam praktik akuntansi publik dan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang lebih baik. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk memenuhi standar global, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam pelaporan keuangan di semua sektor ekonomi Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti perbedaan dalam penerapan standar Akuntansi di Indonesia dan negara lain, seperti yang ditemukan oleh Christian et al. (2023). Mereka menemukan bahwa meskipun baik Indonesia maupun Rusia mengadopsi IFRS sebagai pedoman untuk pelaporan keuangan mereka, tetap terdapat variasi dalam cara pengakuan, penyajian, dan pencatatan transaksi dalam laporan keuangannya. Perbedaan dalam praktik akuntansi antara

kedua negara ini memiliki implikasi signifikan bagi perusahaan yang beroperasi di keduanya. Studi dari Christian et al. (2022) juga mengungkapkan variasi dalam praktik akuntansi Italia dalam berbagai aspek, termasuk pelaporan keuangan, laporan keuangan konsolidasi, perlakuan terhadap bunga, dividen, goodwill, dan persediaan, antara PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan *Organismo Italiano di Contabilità* (OIC).

Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelajahi standar Akuntansi keuangan dari perspektif berbagai negara. Dengan demikian, analisis standar Akuntansi dapat memberikan pemahaman tentang perbedaan yang terlihat antara Indonesia dan UEA dalam konteks Akuntansi. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan Akuntansi yang signifikan antara kedua negara; 2) mengevaluasi dan membandingkan praktik Akuntansi di UEA dan Indonesia, termasuk sejarah, badan organisasi, sertifikasi, serta kode etik akuntansi yang berlaku di kedua negara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami kompleksitas perbedaan antara kedua negara tersebut dan bagaimana implementasi IFRS mempengaruhi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana informasi dikumpulkan tidak menggunakan data statistik atau berbentuk angka. Penelitian kualitatif menekankan pada validasi data antara data yang diperoleh dengan hal yang akan diteliti dan bertujuan untuk memahami mengenai fenomena yang terjadi dan disajikan secara deskriptif (Adlini et al., 2022).

Data yang digunakan berasal dari berita, artikel serta berbagai jurnal yang relevan terkait penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak berasal dari subjek utama penelitian, tetapi berasal dari dokumen sekunder yang tersedia di internet dari situs terpercaya untuk dijadikan data dalam penelitian ini (Christian et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Akuntansi

a. UEA

1) 1990-an: Awal Pengembangan Standar Akuntansi

Pada awal 1990-an, UEA mulai mengembangkan sistem keuangan dan akuntansinya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun belum ada standar akuntansi nasional yang terstruktur, praktik akuntansi saat itu sangat dipengaruhi oleh standar dan praktik internasional, terutama dari negara-negara Barat dan negara-negara teluk lainnya.

2) 2000-an: Peningkatan Regulasi dan Pengaruh Internasional

Memasuki awal 2000-an, UEA mulai melihat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan untuk menarik lebih banyak investasi asing. Pemerintah mulai memperkenalkan regulasi yang lebih ketat untuk perusahaan, terutama bagi mereka yang terdaftar di pasar modal. Beberapa perusahaan mulai mengadopsi standar akuntansi internasional, meskipun belum ada adopsi penuh terhadap IFRS.

3) 2015: Adopsi Penuh IFRS

Titik balik signifikan dalam sejarah akuntansi di UEA terjadi pada tahun 2015 ketika UEA mengadopsi IFRS secara penuh dan langsung tanpa modifikasi. Keputusan ini dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta untuk menarik lebih banyak investasi internasional. *Emirates Securities and Commodities Authority* (ESCA) mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di bursa saham untuk mematuhi IFRS. Langkah ini juga didukung oleh *Dubai Financial Services Authority* (DFSA) dan *Abu Dhabi Accountability Authority* (ADAA).

4) 2018-2024: Perkembangan Terbaru dan Peningkatan Kapasitas

Pada periode ini, UEA terus memperkuat regulasi dan infrastruktur akuntansi untuk memastikan kepatuhan terhadap IFRS dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Beberapa inisiatif penting dan perkembangan yang terjadi meliputi:

- i. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan
ESCA, DFSA, dan ADAA terus meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi IFRS. Ini termasuk audit berkala dan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar.
- ii. Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi seperti *Accountants and Auditors Association (AAA)* dan cabang *Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)* di Dubai memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi profesional akuntansi di UEA. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa para akuntan memiliki pemahaman yang mendalam tentang IFRS dan praktik terbaik dalam akuntansi.
- iii. Teknologi dan Digitalisasi
UEA juga berinvestasi dalam teknologi dan digitalisasi proses akuntansi. Penerapan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) dan teknologi blockchain untuk pelaporan keuangan mulai diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- iv. Standar Etika
UEA memperkenalkan standar etika yang lebih ketat untuk profesional akuntansi, termasuk kode etik yang diterapkan oleh AAA. Ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.
- v. Kolaborasi Internasional
UEA menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti IASB dan IFAC untuk memastikan bahwa standar dan praktik akuntansi di negara tersebut tetap sejalan dengan perkembangan global. (Yuesti & Saitri, 2021)

Indonesia (1990 - Sekarang)

1) 1990-an: Masa Transisi dan Penyesuaian

Pada awal 1990-an, Indonesia sedang dalam proses memperkuat sistem ekonomi dan keuangan nasionalnya. Standar akuntansi saat itu masih sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip akuntansi lama yang diadopsi dari negara-negara Barat, terutama dari Amerika Serikat. Beberapa standar akuntansi yang digunakan masih didasarkan pada *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* dengan sedikit modifikasi lokal. Pengawasan dan regulasi dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2) 2000-an: Adopsi dan Konvergensi IFRS

Pada awal 2000-an, Indonesia mulai bergerak menuju konvergensi dengan IFRS. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan, serta untuk menarik lebih banyak investasi asing. Pada tahun 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) resmi memulai program konvergensi IFRS, dengan tujuan agar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sejalan dengan IFRS.

3) 2012: Implementasi IFRS

Pada tahun 2012, Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS sebagai dasar SAK. Meskipun ada beberapa penyesuaian untuk mencerminkan kondisi lokal, adopsi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan Indonesia. Pengawasan dan regulasi yang lebih ketat juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar baru ini.

4) 2018-2024: Perkembangan Terbaru dan Tantangan

Pada periode ini, Indonesia terus memperkuat sistem akuntansinya dengan berbagai inisiatif dan regulasi baru. OJK terus meningkatkan pengawasan terhadap penerapan SAK dan

memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Audit berkala dan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar menjadi lebih umum. Indonesia mulai mengadopsi teknologi baru dalam proses akuntansi, termasuk penggunaan sistem ERP dan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. IAI dan institusi lainnya terus menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi profesional akuntansi. Program ini membantu para akuntan memahami dan menerapkan IFRS dengan lebih baik. Standar etika untuk profesional akuntansi diperkuat untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik. IAI mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. (Ramadhea Jr, 2022)

Organisasi Akuntansi

a. UEA

1) *Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA)*

ESCA adalah badan pemerintah yang mengawasi penerapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di UEA. ESCA memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar mematuhi IFRS dan standar internasional lainnya.

2) *Dubai Financial Services Authority (DFSA)*

DFSA adalah badan pengatur independen untuk Dubai International Financial Centre (DIFC). DFSA mengawasi lembaga keuangan dan perusahaan yang beroperasi di dalam DIFC, termasuk penerapan standar akuntansi dan audit.

3) *Abu Dhabi Accountability Authority (ADAA)*

ADAA bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di Abu Dhabi. ADAA menetapkan standar audit dan akuntansi untuk entitas pemerintah.

4) *Accountants and Auditors Association (AAA)*

AAA adalah organisasi profesional yang mendukung dan mempromosikan profesi akuntansi di UEA. AAA menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan sumber daya lainnya bagi para anggotanya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka.

5) *Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) - Dubai Chapter*

ICAI memiliki cabang di Dubai yang mendukung anggotanya yang berpraktik di UEA. ICAI - Dubai Chapter menyediakan program pelatihan, seminar, dan sertifikasi untuk anggotanya.

b. Indonesia

1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

IAI adalah organisasi profesi akuntan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi, etika, dan pendidikan akuntansi. IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diadopsi dari IFRS. IAI juga memberikan sertifikasi Chartered Accountant (CA) Indonesia.

2) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

IAPI adalah organisasi yang mengatur profesi akuntan publik di Indonesia. IAPI memberikan sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) Indonesia dan bertanggung jawab untuk menetapkan standar audit dan praktik profesional bagi akuntan publik.

3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK RI memainkan peran penting dalam pengawasan dan akuntabilitas keuangan di sektor publik.

4) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan mengatur kebijakan dan peraturan akuntansi untuk sektor publik dan perpajakan. Kementerian ini juga terlibat dalam pengembangan dan implementasi standar akuntansi di lembaga pemerintah.

5) Asosiasi Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)

IAMI adalah organisasi profesional yang fokus pada pengembangan akuntansi manajemen di Indonesia. IAMI menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi akuntan manajemen dan mempromosikan praktik terbaik dalam manajemen keuangan dan strategis (IAMI, n.d.).

Sertifikasi Akuntansi

a. UEA

1. *Certified Public Accountant (CPA)*

Sertifikasi ini diakui secara luas di UEA dan diberikan oleh badan-badan akuntansi Amerika seperti *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*. CPA menunjukkan keahlian dalam audit, pelaporan keuangan, dan berbagai bidang akuntansi lainnya.

2. *Chartered Accountant (CA)*

Sertifikasi ini diberikan oleh berbagai badan akuntansi profesional seperti *Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)* dan *Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)*. CA diakui di UEA dan menunjukkan kemampuan dalam bidang akuntansi, audit, dan perpajakan.

3. *Certified Management Accountant (CMA)*

Sertifikasi ini diberikan oleh *Institute of Management Accountants (IMA)* dan diakui di UEA. CMA berfokus pada akuntansi manajemen, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan bisnis.

4. *Certified Internal Auditor (CIA)*

Sertifikasi ini diberikan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)* dan diakui di UEA. CIA menunjukkan kompetensi dalam audit internal, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

5. *Diploma in International Financial Reporting (DipIFR)*

Sertifikasi ini diberikan oleh *Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* dan membantu profesional di UEA memahami dan menerapkan IFRS.

b. Indonesia

1) *Chartered Accountant (CA) Indonesia*

Sertifikasi ini diberikan oleh IAI. Untuk mendapatkan CA Indonesia, seorang akuntan harus memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman kerja, dan lulus ujian yang ditetapkan oleh IAI. Sertifikasi ini menekankan kompetensi di bidang akuntansi keuangan, manajemen, audit, dan perpajakan, serta standar akuntansi internasional.

2) *Certified Public Accountant (CPA) Indonesia*

Sertifikasi ini diberikan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). CPA Indonesia mempersiapkan akuntan untuk bekerja di bidang audit dan jasa akuntansi publik. Sertifikasi ini diakui secara luas dalam industri dan menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki keahlian profesional yang diperlukan untuk memberikan jasa audit dan akuntansi yang berkualitas tinggi.

3) *Certified Internal Auditor (CIA)*

Sertifikasi internasional yang juga diakui di Indonesia dan dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Sertifikasi ini menunjukkan kompetensi dalam audit internal dan pengendalian internal, yang penting bagi akuntan yang bekerja di sektor swasta maupun publik.

4) *Certified Management Accountant* (CMA)

Sertifikasi ini diberikan oleh *Institute of Management Accountants* (IMA) dan diakui di Indonesia. CMA berfokus pada akuntansi manajemen dan strategi bisnis, memberikan keahlian dalam analisis keuangan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategis.

5) *Diploma in International Financial Reporting* (DipIFR)

Sertifikasi dari *Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA) yang diakui di Indonesia. DipIFR membantu akuntan memahami dan menerapkan IFRS, yang penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global (IAI, n.d.-a).

Perbedaan Standar Akuntansi di Indonesia dan Uni Emirat Arab

Pengenalan Standar Akuntansi

UEA mengadopsi IFRS secara penuh sejak tahun 2015. Standar ini diimplementasikan oleh *Emirates Securities and Commodities Authority* (ESCA) untuk perusahaan yang terdaftar, serta badan pengatur lainnya seperti *Dubai Financial Services Authority* (DFSA) dan *Abu Dhabi Accountability Authority* (ADAA). (Suprihatin & Tresnaningsih, 2013)

Indonesia menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini secara bertahap diselaraskan dengan IFRS. (Standar et al., 2022)

Perbedaan Lainnya:

a. Adopsi dan Penyesuaian IFRS

1 UEA

IFRS diadopsi secara penuh dan langsung tanpa modifikasi. Perusahaan di UEA harus mematuhi IFRS seperti yang ditetapkan oleh IASB.

2 Indonesia

SAK mengadopsi IFRS dengan penyesuaian untuk kondisi lokal. Ini berarti ada beberapa modifikasi pada IFRS untuk mencerminkan praktik bisnis dan peraturan lokal. Misalnya, aturan mengenai pengakuan dan pengukuran tertentu dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan domestik.

b. Regulasi dan Pengawasan

1) UEA

Pengawasan dilakukan oleh ESCA untuk perusahaan publik, DFSA untuk perusahaan di *Dubai International Financial Centre* (DIFC), dan ADAA untuk entitas pemerintah di Abu Dhabi. Pengaturan ini memastikan penerapan IFRS yang konsisten di berbagai sektor.

2) Indonesia

Standar akuntansi dikeluarkan oleh IAI dan diterapkan oleh berbagai entitas dengan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk sektor keuangan.

c. Penerapan pada Sektor Publik

1) UEA

IFRS diterapkan di sektor publik dengan pengawasan dari badan pemerintah seperti ADAA, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

2) Indonesia

Sektor publik diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terpisah dari SAK dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

d. Pelaporan Keuangan dan Pengungkapan

1) UEA

Perusahaan harus mematuhi persyaratan pengungkapan IFRS sepenuhnya, dengan tambahan pengungkapan yang diatur oleh badan pengawas seperti ESCA dan DFSA, tergantung pada lokasi dan jenis entitas.

2) Indonesia

Laporan keuangan harus mencakup pengungkapan tambahan sesuai dengan peraturan lokal, termasuk laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor independen.

Tabel 1.1 Perbedaan Badan Akuntansi dari Indonesia dan UEA

	UEA	Indonesia
Badan Penetapan Standar	ESCA	DSAK IAI
Badan Pengawas	Otoritas Akuntabilitas UEA (UAEAA)	Komisi Akuntansi Keuangan Sektor Publik (KAP)
Organisasi Akuntansi	<i>Emirates Association for Accountants & Auditors</i> (EAAA)	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
Standar Akuntansi Nasional		PSAK
Standar Pelaporan Keuangan	IFRS, IFRS-UKM	PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM

Sumber: (EAAA, n.d.; IAI, n.d.-a)

Aturan Profesi Akuntansi

UEA

Dalam *guidance on the code ethics book* (Federal Authority UAE, n.d.), seorang akuntan profesional memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan publik, kepercayaan masyarakat luas, pemerintahan dan pandangan dunia usaha terhadap profesi akuntansi. Keyakinan ini dapat dijamin jika seorang akuntan profesional:

- 1) Mematuhi prinsip etika dan standar profesional
- 2) Menggunakan kecerdasan bisnis
- 3) Menerapkan keahlian di bidang teknis dan lainnya
- 4) Menerapkan penilaian profesional

Indonesia

Kode etik profesi akuntansi di Indonesia diterbitkan oleh IAPI berdasarkan prinsip-prinsip moral profesional yang meliputi (IAI, n.d.-b):

1. Integritas

Seorang akuntan harus jujur dan tulus dalam menjalankan tugasnya

2. **Objektivitas**
 Seorang akuntan harus menetapkan kemandirian mental dan jujur dalam penilaian berdasarkan profesional mereka
3. **Kompetensi dan kepatuhan hukum**
 Seorang akuntan dapat menjaga dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan profesional dan melaksanakan layanan secara kompeten
4. **Kerahasiaan**
 Seorang akuntan harus dapat menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima sesuai tugas profesional mereka
5. **Kepentingan Publik**
 Seorang akuntan harus dapat bertindak sesuai dengan kepentingan publik
6. **Perilaku Profesional**
 Seorang akuntan harus dapat menjaga dan menghindari tindakan dan perilaku yang dapat merusak nama baik profesi akuntansi.

Perbedaan UEA dan Indonesia dari Sisi Pencatatan Akuntansi

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan standar Akuntansi yang dimiliki oleh uea dan indonesia, terdapat beberapa hal yang dapat dibandingkan yaitu:

Tabel 1.2 Perbedaan UEA dan Indonesia dari Sisi Pencatatan Akuntansi

Perbedaan	UEA	Indonesia
Persediaan	IAS 2	PSAK 14
<i>Property, Plant, and Equipment</i> (PPE) Aset Tetap	IAS 16	PSAK 16
Instrumen Keuangan	IFRS 9	PSAK 55
Pengakuan Pendapatan	IFRS 15	PSAK 72
Pajak Penghasilan	IAS 12	PSAK 46
Persyaratan Pengungkapan	Mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi signifikan, pertimbangan, penggunaan estimasi, risiko keuangan dan ketidakpastian	Persyaratan pengungkapan mengenai peraturan serta kondisi ekonomi di Indonesia

Sumber: (IAI, n.d.-a; IFRS, 2024)

Perbedaan tersebut kemudian dirincikan sebagai berikut (IAI, n.d.-a; IFRS, 2024):

1. Persediaan

Perbandingan antara pendekatan penilaian persediaan berdasarkan *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance* (IAS) 2 (yang diadopsi di UEA) dan PSAK 14 (di Indonesia) menunjukkan kesamaan dalam prinsip dasar *lower of cost or net realizable value* (LCNRV), namun terdapat juga perbedaan dalam pelaksanaannya yang dapat dipengaruhi oleh praktik dan kondisi lokal di masing-masing negara.

IAS 2, yang diadopsi di UEA, mengatur bahwa persediaan umumnya dinilai berdasarkan LCNRV. LCNRV sendiri merupakan estimasi harga jual persediaan setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk menjualnya. Ini berarti bahwa jika nilai persediaan (yang merupakan biaya perolehan) lebih tinggi daripada nilai realisasi bersih yang diharapkan dari penjualan persediaan tersebut, maka nilai persediaan harus diturunkan menjadi nilai realisasi bersih tersebut.

Di sisi lain, PSAK 14 di Indonesia juga mengadopsi prinsip LCNRV seperti yang terdapat dalam IFRS, dengan penekanan bahwa penyesuaian nilai persediaan dapat dilakukan berdasarkan praktik atau kondisi khusus yang relevan. Perusahaan di Indonesia mengikuti PSAK yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI serta aturan setempat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas tertentu dalam menerapkan prinsip LCNRV sesuai dengan konteks bisnis dan lingkungan regulasi di Indonesia.

Perbedaan dalam penerapan LCNRV antara UEA dan Indonesia dapat mencakup aspek praktis seperti perhitungan biaya untuk menjual persediaan, interpretasi nilai realisasi bersih, serta pengaturan detail terkait penyesuaian nilai persediaan berdasarkan kebutuhan lokal. Meskipun prinsip dasarnya serupa, implementasi dan penekanan pada aspek tertentu dapat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing negara atau wilayah.

Dengan demikian, meskipun ada konvergensi dalam prinsip akuntansi internasional seperti LCNRV yang terlihat dalam IAS 2 dan PSAK 14, penilaian persediaan masih dapat menunjukkan variasi dalam praktik pelaksanaannya sesuai dengan perbedaan kondisi dan kebijakan setempat di UEA dan Indonesia.

2. *Property, Plant and Equipment (PPE) Aset Tetap*

Pencatatan aset tetap berdasarkan IFRS yang diadopsi di UEA, sebagaimana diatur dalam IAS 16, mengacu pada biaya perolehan yang mencakup semua biaya yang relevan yang dikeluarkan untuk memperoleh, menginstalasi, dan menyiapkan aset tetap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Konsep ini mencakup biaya pembelian, biaya transportasi, biaya pemasangan, serta biaya lainnya yang langsung terkait dengan mempersiapkan aset tetap tersebut untuk digunakan.

Di UEA, aset tetap didepresiasi selama umur manfaatnya sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam IAS 16. Proses depresiasi ini mengurangi nilai aset tetap dari biaya perolehan awalnya secara sistematis, mencerminkan estimasi penggunaan ekonomis dari aset tersebut selama umur manfaat yang diharapkan.

Selain depresiasi, IAS 16 juga mengatur mengenai pengujian penurunan nilai aset tetap jika terdapat indikasi bahwa nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan melalui penggunaannya dan penjualannya. Penurunan nilai ini harus diakui dan disesuaikan untuk mencerminkan nilai wajar yang lebih rendah dari aset tetap tersebut.

Sementara itu, di Indonesia, pencatatan aset tetap mengikuti PSAK 16 yang sejalan dengan prinsip IFRS. Meskipun prinsip dasarnya serupa dengan yang diterapkan di UEA, terdapat variasi dalam metode depresiasi yang dapat digunakan, masa manfaat yang ditetapkan, serta pendekatan dalam menguji penurunan nilai. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan praktik yang lebih khusus dalam industri atau sektor tertentu di Indonesia.

Perbedaan dalam metode depresiasi dapat mempengaruhi jumlah depresiasi tahunan yang dibebankan ke laba rugi, sementara perbedaan dalam masa manfaat dapat mempengaruhi estimasi nilai residu dan besarnya depresiasi yang diperhitungkan setiap tahunnya. Pengujian penurunan nilai juga dapat mencerminkan perbedaan dalam cara industri di Indonesia menilai potensi penurunan nilai aset tetap berdasarkan kondisi ekonomi, teknologi, atau perubahan lainnya yang mungkin mempengaruhi nilai wajar aset.

Dengan demikian, meskipun prinsip dasar pencatatan aset tetap mengikuti IFRS baik di UEA maupun Indonesia, implementasi dan detail pelaksanaannya dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan lokal, kondisi pasar, serta praktik industri yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat konvergensi menuju standar akuntansi internasional, aspek lokal tetap memainkan peran penting dalam aplikasi praktisnya di setiap negara atau wilayah.

3. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah salah satu aspek penting dalam pelaporan keuangan yang diatur secara ketat oleh standar akuntansi internasional seperti IFRS. Perbandingan antara perlakuan instrumen keuangan di UEA dan Indonesia, berdasarkan IFRS dan PSAK yang diadopsi, menunjukkan kesamaan dalam prinsip dasar namun juga memperlihatkan variasi dalam implementasi yang didasarkan pada interpretasi lokal dan peraturan tambahan.

Di UEA, instrumen keuangan diatur oleh IFRS 9. Standar ini mengklasifikasikan aset keuangan menjadi beberapa kategori utama, termasuk aset keuangan yang dapat dinilai secara wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi. Pengklasifikasian ini penting karena mempengaruhi bagaimana instrumen keuangan dinilai dan dilaporkan dalam neraca perusahaan. Di samping itu, IFRS 9 juga mengatur mengenai penurunan nilai (*impairment*) untuk memastikan bahwa nilai aset keuangan mencerminkan nilai realistiknya sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Adaptasi IFRS 9 di UEA juga mempertimbangkan peraturan dari ESCA, yang merupakan regulator pasar modal di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi standar internasional seperti IFRS tidak hanya memperhatikan persyaratan akuntansi global, tetapi juga mengintegrasikan persyaratan lokal yang relevan untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan dengan regulasi domestik.

Di Indonesia, instrumen keuangan diatur oleh PSAK 55 yang sejalan dengan IFRS namun dapat memiliki interpretasi dan persyaratan tambahan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI. Peraturan ini dapat mencakup kebijakan spesifik terkait dengan perlakuan atau pengungkapan instrumen keuangan tertentu yang lebih sesuai dengan praktik bisnis dan kondisi pasar di Indonesia. Interpretasi dan persyaratan lokal ini penting untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari lingkungan bisnis di Indonesia.

Perbedaan antara UEA dan Indonesia dalam perlakuan instrumen keuangan dapat mencakup aspek seperti pengklasifikasian, metode pengukuran nilai, dan pengungkapan tambahan yang diperlukan. Meskipun prinsip dasar dari IFRS atau PSAK serupa, implementasi yang tepat dapat bervariasi untuk mencerminkan perbedaan dalam regulasi lokal, kebutuhan pasar, dan praktek industri yang berlaku.

Secara keseluruhan, walaupun terdapat upaya untuk mengharmonisasi standar akuntansi internasional, pengaturan instrumen keuangan di UEA dan Indonesia menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam menerapkan standar global untuk memastikan relevansi, konsistensi, dan kepatuhan yang optimal dalam pelaporan keuangan.

4. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan di UEA dan Indonesia merupakan bagian penting dari proses penyusunan laporan keuangan yang mengikuti standar internasional yang relevan. Di UEA, pengakuan pendapatan didasarkan pada IFRS 15 yang menguraikan prosesnya dalam lima langkah utama. Pertama, pengakuan dimulai saat terbentuknya kontrak dengan pelanggan yang menciptakan hak dan kewajiban hukum. Kedua, perusahaan menilai kewajiban yang diperoleh dari kontrak untuk memberikan barang atau jasa. Ketiga, harga transaksi diidentifikasi dalam kontrak, yang kemudian dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan dalam langkah keempat. Akhirnya, pendapatan diakui saat atau segera setelah kewajiban pelaksanaan terpenuhi.

Di Indonesia, pengakuan pendapatan diatur oleh PSAK 72 yang telah diadopsi untuk menggantikan PSAK 23 dan sejalan dengan IFRS 15. PSAK 72 mengikuti prinsip-prinsip yang mirip dengan IFRS 15 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Meskipun demikian, terdapat juga interpretasi dan panduan tambahan dari DSAK-IAI, yang bertujuan untuk mengklarifikasi penerapan standar ini dalam konteks bisnis yang unik di Indonesia.

Perbedaan antara pengakuan pendapatan di UEA dan Indonesia mencakup aspek interpretasi lokal serta panduan tambahan yang mempengaruhi penerapan praktisnya. Di UEA, implementasi IFRS 15 juga mempertimbangkan regulasi dari ESCA, yang memastikan kesesuaian dengan kebijakan pasar modal lokal. Sementara itu, di Indonesia, PSAK 72 mencerminkan upaya untuk mengadopsi standar internasional yang lebih mutakhir, sambil tetap memberikan panduan yang relevan dengan kondisi pasar dan industri di dalam negeri.

Secara keseluruhan, baik di UEA maupun Indonesia, pengakuan pendapatan mengikuti prinsip-prinsip internasional yang relevan seperti yang diatur dalam IFRS 15 atau PSAK 72. Namun, penerapan praktisnya dapat bervariasi untuk mempertimbangkan konteks regulasi lokal, kebijakan pasar modal, dan keunikan industri di masing-masing negara. Ini penting untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga relevan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis serta regulasi yang berlaku di setiap negara atau wilayah.

5. Pajak Penghasilan

Peraturan akuntansi mengenai pajak penghasilan adalah hal yang vital dalam konteks keuangan perusahaan, karena mempengaruhi bagaimana pajak penghasilan diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Perbandingan antara pengaturan pajak penghasilan di UEA dan Indonesia, yang masing-masing mengacu pada IAS 12 (yang diadopsi sebagai PSAK 46 di Indonesia), mengungkapkan kesamaan dalam prinsip dasar namun juga memperlihatkan variasi dalam aplikasi praktisnya yang dipengaruhi oleh regulasi dan kondisi lokal.

Di UEA, peraturan akuntansi pajak penghasilan didasarkan pada IAS 12. Standar ini mengatur pengakuan kewajiban pajak kini (*current tax liabilities*) dan aset pajak kini (*current tax assets*), serta kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) dan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*). Pengakuan ini didasarkan pada perbedaan antara dasar pengenaan pajak dan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan atas aset dan liabilitas.

IAS 12 memungkinkan perusahaan untuk menghitung kewajiban pajak tangguhan berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan nilai yang akan diperhitungkan untuk tujuan pajak. Hal ini dapat mengakibatkan adanya aset pajak tangguhan jika nilai tercatat aset dalam laporan keuangan lebih rendah daripada nilai tercatat untuk tujuan pajak, atau kewajiban pajak tangguhan jika terjadi sebaliknya.

Di Indonesia, PSAK 46 mengatur prinsip-prinsip yang sejalan dengan IAS 12 untuk pengakuan kewajiban dan aset pajak kini serta pajak tangguhan. Meskipun prinsip dasarnya serupa, terdapat juga perbedaan dalam interpretasi dan penerapan praktisnya yang mempertimbangkan kondisi pasar dan industri yang spesifik di Indonesia.

Perbedaan dalam peraturan dan interpretasi perpajakan di Indonesia dapat mencakup panduan tambahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau praktik perpajakan yang berlaku dalam sektor industri tertentu. Misalnya, dalam industri tertentu seperti pertambangan atau perkebunan, terdapat aturan khusus terkait pengakuan dan penghitungan pajak yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya untuk konvergensi dalam standar akuntansi internasional seperti IAS 12 dan PSAK 46, perbedaan dalam regulasi perpajakan dan interpretasi lokal menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam penerapan praktisnya. Ini membantu memastikan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya memenuhi persyaratan akuntansi global, tetapi juga relevan dan sesuai dengan kondisi pasar serta regulasi perpajakan yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah.

6. Persyaratan Pengungkapan

Pengungkapan dalam laporan keuangan adalah proses penting yang tidak hanya memastikan transparansi tetapi juga memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Perbandingan pengungkapan antara UEA dan Indonesia menggambarkan

pendekatan yang serupa dalam hal prinsip dasar, namun juga mengungkapkan perbedaan yang tercermin dalam kondisi ekonomi dan praktik akuntansi lokal.

Di UEA, pengungkapan dalam laporan keuangan mengikuti IFRS yang mengatur standar internasional untuk pengungkapan kebijakan akuntansi signifikan, pertimbangan penting, penggunaan estimasi, risiko keuangan, dan ketidakpastian. Kebijakan akuntansi signifikan mencakup metode pengukuran, pengakuan pendapatan, depresiasi aset, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi evaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Pertimbangan penting dan penggunaan estimasi mencerminkan tingkat ketidakpastian yang melekat dalam estimasi nilai aset, kewajiban, pendapatan masa depan, dan biaya.

Pengungkapan risiko keuangan dan ketidakpastian juga penting dalam memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan mengenai potensi risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Informasi ini membantu investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan yang informasional dan lebih terinformasi.

Di sisi lain, di Indonesia, persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan, yang diatur oleh PSAK, sering kali mencerminkan kondisi ekonomi dan praktik akuntansi yang khas di dalam negeri. Meskipun PSAK Indonesia didasarkan pada IFRS untuk memastikan kesesuaian internasional, terdapat juga pengaturan dan panduan tambahan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI yang mempertimbangkan aspek-aspek unik dari lingkungan ekonomi Indonesia.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam PSAK Indonesia dapat mencakup informasi tentang regulasi pajak yang berlaku, kondisi pasar lokal, serta faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi operasi perusahaan. Hal ini berbeda dengan IFRS yang lebih umum dan cenderung mengacu pada standar internasional tanpa mempertimbangkan secara spesifik konteks lokal di setiap negara.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pengungkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap pasar dan lingkungan bisnis. Dengan memperhatikan konteks ekonomi dan regulasi lokal, pengungkapan dalam laporan keuangan tidak hanya memenuhi persyaratan akuntansi, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam hal transparansi dan pemahaman yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Ini penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan membangun kepercayaan dalam pasar keuangan global yang semakin terhubung.

Perbedaan Tambahan Akuntansi di UEA dan Indonesia

Di luar area akuntansi spesifik yang telah dibahas, ada beberapa perbedaan tambahan yang berpotensi muncul antara IFRS UEA dan PSAK Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini dapat muncul karena berbagai faktor seperti lingkungan peraturan, kondisi ekonomi, pengaruh budaya, dan interpretasi atau praktik spesifik yang diadopsi di setiap yurisdiksi. Berikut adalah beberapa perbedaan tambahan yang perlu dipertimbangkan:

1) Hibah Pemerintah

Pengakuan hibah dalam konteks akuntansi merupakan proses yang mengatur cara dan kapan suatu hibah diakui dalam laporan keuangan suatu entitas. Perbandingan antara pengakuan hibah di UEA dan Indonesia, yang masing-masing mengacu pada standar internasional yang relevan seperti IAS 20 dan PSAK 20, menunjukkan pendekatan yang serupa dalam prinsip dasar namun juga mengungkapkan perbedaan dalam persyaratan dan panduan lokal yang mempengaruhi aplikasinya.

Di UEA, pengakuan hibah didasarkan pada IAS 20. Standar ini menyediakan panduan tentang pengakuan hibah dari pemerintah atau lembaga publik lainnya. Hibah diakui pada nilai wajar jika entitas memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam IAS 20. Kriteria ini dapat meliputi persyaratan spesifik terkait dengan tujuan hibah, syarat-syarat penggunaan dana, dan kewajiban yang mungkin timbul sebagai akibat menerima hibah tersebut. Pengakuan pada nilai

wajar ini penting karena memastikan bahwa nilai manfaat ekonomis yang diterima entitas dari hibah tercermin dengan tepat dalam laporan keuangannya.

Di Indonesia, pengakuan hibah didasarkan pada PSAK 20 (Akuntansi untuk Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah). PSAK 20 sejalan dengan prinsip-prinsip IFRS namun dapat memiliki interpretasi dan panduan tambahan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI untuk mempertimbangkan aspek-aspek unik dalam konteks ekonomi dan kebijakan publik Indonesia. Perbedaan ini dapat mencakup persyaratan khusus mengenai pengakuan atau pengungkapan hibah pemerintah yang relevan dengan kondisi lokal, termasuk kebijakan pajak dan peraturan fiskal yang berlaku.

Selain persyaratan pengakuan, pengungkapan hibah juga menjadi perhatian penting dalam kedua standar tersebut. Pengungkapan yang transparan dan komprehensif membantu pemangku kepentingan, seperti investor, analis keuangan, dan masyarakat umum, untuk memahami dampak dari hibah yang diterima oleh entitas. Informasi ini juga mendukung keputusan investasi dan evaluasi kinerja keuangan entitas secara lebih baik.

Secara keseluruhan, meskipun prinsip-prinsip dasar akuntansi untuk hibah dalam IAS 20 dan PSAK 20 serupa, perbedaan dalam persyaratan dan panduan lokal antara UEA dan Indonesia menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks ekonomi, kebijakan publik, dan praktik akuntansi yang berlaku di setiap negara. Hal ini membantu memastikan bahwa pengakuan dan pengungkapan hibah tidak hanya mematuhi standar internasional, tetapi juga relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasi dan transparansi di pasar lokal masing-masing.

2) Konsolidasi dan Kombinasi Bisnis

Berdasarkan peraturan IFRS 10 (Konsolidasi Laporan Keuangan) dan IFRS 3 (Kombinasi Bisnis), yang diadopsi di UEA, terdapat panduan yang jelas mengenai bagaimana entitas harus mengonsolidasikan laporan keuangannya serta mengakuisisi bisnis lain. IFRS 10 menetapkan bahwa entitas harus mengkonsolidasikan entitas anak ketika entitas induk memiliki pengendalian atas entitas anak tersebut. Pengendalian dalam konteks ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasional dari entitas anak dengan tujuan untuk memanfaatkan manfaat ekonomis yang terkait dengan entitas tersebut.

Penerapan IFRS 10 di UEA memastikan bahwa pengendalian tersebut diukur dan diakui dengan tepat, termasuk pengakuan aset, *goodwill*, kewajiban, dan elemen lain yang signifikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, IFRS 3 mengatur proses kombinasi bisnis, di mana akuisisi aset dan bisnis oleh entitas diukur dengan nilai wajar saat perolehan, dengan nilai-nilai yang sesuai dan berdasarkan pada evaluasi keuangan yang akurat.

Di Indonesia, prinsip dasar IFRS 10 dan IFRS 3 juga telah diadopsi dalam PSAK yang relevan. Namun, pengimplementasian di Indonesia dapat mengalami perbedaan karena interpretasi dan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, dalam konteks interpretasi, ada penekanan pada bagaimana entitas Indonesia mengenali dan mengukur pengendalian atas entitas anak, yang mungkin mempertimbangkan faktor-faktor seperti struktur kepemilikan dan pengaruh signifikan dari pihak lain seperti pemerintah atau investor strategis lokal. Persyaratan khusus di Indonesia juga dapat mencakup panduan tambahan dari DSAK-IAI yang mempertimbangkan praktik industri tertentu atau kebijakan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan dan pengukuran dalam konsolidasi dan kombinasi bisnis sesuai dengan kondisi pasar dan lingkungan bisnis di Indonesia.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya adaptasi standar internasional seperti IFRS dalam konteks lokal yang unik. Meskipun prinsip-prinsip dasar konsolidasi dan kombinasi bisnis sebagian besar seragam, interpretasi dan penerapan praktisnya dapat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan transparansi yang sesuai dengan kondisi setempat. Ini penting dalam mendukung kepatuhan, akuntabilitas, dan pemahaman yang lebih baik terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan di pasar global yang semakin terhubung.

3) Sewa

Pengakuan sewa merupakan aspek penting dalam laporan keuangan yang mengatur bagaimana entitas mengakui kewajiban sewa dan aset hak pengguna dari perspektif penyewa. Perbandingan antara pengakuan sewa di UEA dan Indonesia, yang mengacu pada IFRS 16 dan PSAK 73 (yang mengadopsi IFRS 16), menunjukkan kesamaan dalam prinsip dasar namun juga mengungkapkan perbedaan dalam penerapan praktisnya yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan regulasi lokal.

Di UEA, pengakuan sewa didasarkan pada IFRS 16 (Leases), yang memperkenalkan pendekatan baru untuk akuntansi sewa bagi penyewa. Sesuai dengan IFRS 16, penyewa harus mengakui kewajiban sewa di neraca sebagai liabilitas sewa dan mengakui aset hak pengguna (*right-of-use asset*) yang mencerminkan hak untuk menggunakan aset tersebut selama periode sewa. Pendekatan ini menggantikan pendekatan lama yang memperlakukan sebagian besar sewa sebagai sewa operasi, di mana kewajiban sewa hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penerapan IFRS 16 di UEA memastikan bahwa penyewa mengakui kewajiban sewa dan aset hak pengguna dengan cara yang lebih transparan dan mencerminkan komitmen yang sebenarnya terhadap sewa jangka panjang. Pengakuan ini membantu meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan dan kewajiban utang perusahaan terkait dengan sewa.

Di Indonesia, PSAK 73 mengadopsi IFRS 16 untuk pengakuan sewa, namun penerapannya dapat mengalami variasi dalam perhitungan dan pengukuran sesuai dengan kondisi ekonomi dan praktik bisnis yang khas di dalam negeri. Perbedaan ini dapat mencakup interpretasi tambahan dari DSAK-IAI yang mempertimbangkan karakteristik industri tertentu atau kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dalam beberapa sektor seperti properti atau transportasi, metode pengukuran nilai sewa atau aset hak pengguna dapat bervariasi untuk mencerminkan dinamika pasar yang berbeda.

Secara keseluruhan, pengakuan sewa berdasarkan IFRS 16 dan PSAK 73 menunjukkan komitmen UEA dan Indonesia dalam mengadopsi standar internasional yang relevan. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya seragam, perbedaan dalam perhitungan dan pengukuran sewa menggambarkan pentingnya adaptasi lokal untuk memenuhi kebutuhan informasi yang spesifik dan kondisi ekonomi yang berbeda di setiap negara.

4) Penurunan Nilai Aset

Penurunan nilai aset adalah proses penting dalam akuntansi yang memungkinkan entitas untuk menilai nilai tercatat aset mereka apakah masih mewakili nilai yang dapat dihasilkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut di masa depan. Perbandingan antara penurunan nilai aset di UEA dan Indonesia, yang masing-masing mengacu pada IAS 36 (*Impairment of Assets*) dan PSAK 55 (Penurunan Nilai Aset), menunjukkan pendekatan yang serupa dalam prinsip dasar namun juga mencerminkan adaptasi yang diperlukan untuk mengakomodasi kondisi dan praktik bisnis yang berbeda secara lokal.

Di UEA, penurunan nilai aset diatur oleh IAS 36 yang memberikan panduan tentang kapan dan bagaimana entitas harus menilai adanya indikasi penurunan nilai (*impairment*) pada aset mereka. Standar ini memerlukan evaluasi secara reguler untuk menentukan apakah nilai tercatat aset melebihi nilai pemulihan yang dapat dihasilkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus mengakui kerugian penurunan nilai yang sesuai dalam laporan keuangannya.

Di Indonesia, PSAK 55 mengadopsi IAS 36 untuk mengatur penurunan nilai aset. Namun, ada penyesuaian dan interpretasi tambahan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan praktik bisnis yang berlaku di Indonesia. Adaptasi ini

bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan PSAK 55 lebih relevan dan efektif dalam konteks lokal, sehingga pengakuan penurunan nilai aset dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pasar dan kondisi ekonomi yang khusus.

Perbedaan dalam penerapan PSAK 55 di Indonesia dapat mencakup metode penilaian nilai pemulihan (*recoverable amount*) yang berbeda atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penilaian nilai aset. Misalnya, dalam beberapa industri seperti pertambangan atau konstruksi, proses penilaian nilai pemulihan dapat melibatkan pertimbangan lebih mendalam terhadap kondisi pasar lokal dan potensi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi nilai aset.

Pengungkapan dalam laporan keuangan juga penting dalam konteks penurunan nilai aset, di mana entitas harus memberikan informasi yang cukup kepada pemangku kepentingan tentang proses evaluasi, asumsi yang digunakan, serta dampak finansial dari penurunan nilai aset yang diakui. Informasi ini membantu investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan terinformasi.

Secara keseluruhan, pengaturan penurunan nilai aset dalam IAS 36 dan PSAK 55 menunjukkan komitmen UEA dan Indonesia dalam mengadopsi standar internasional yang relevan sambil mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya serupa, adaptasi lokal penting untuk memastikan bahwa pengakuan dan pengukuran penurunan nilai aset mencerminkan kondisi pasar dan praktik bisnis yang berlaku di masing-masing negara.

5) Imbalan Kerja

Peraturan mengenai imbalan kerja bagi karyawan adalah hal yang penting dalam konteks akuntansi karena mencakup kewajiban finansial perusahaan terhadap karyawan yang terkait dengan pelayanan masa depan mereka. Perbandingan antara peraturan imbalan kerja di UEA dan Indonesia, yang masing-masing mengacu pada IAS 19 (*Employee Benefits*) dan PSAK 24 (Imbalan Kerja), mengilustrasikan pendekatan yang serupa dalam prinsip dasar namun juga mencerminkan adaptasi yang diperlukan untuk memenuhi kondisi dan peraturan lokal yang berbeda.

Di UEA, pengaturan imbalan kerja karyawan didasarkan pada IAS 19 yang mengharuskan entitas untuk mengakui dan mengukur kewajiban imbalan pasti dan imbalan pasca kerja dengan cermat. Imbalan pasti mencakup imbalan yang dijanjikan kepada karyawan sebagai bagian dari perjanjian kerja, seperti pensiun dan manfaat kesehatan. Sementara itu, imbalan pasca kerja mencakup manfaat yang diberikan kepada karyawan setelah masa kerja mereka berakhir, seperti pensiun dini atau manfaat pasca kerja lainnya. Pengakuan kewajiban ini harus mempertimbangkan estimasi masa depan dan nilai kini dari manfaat yang dijanjikan, serta faktor risiko yang terkait dengan pengelolaan dana imbalan.

Di Indonesia, PSAK 24 mengadopsi prinsip-prinsip yang sama seperti yang terdapat dalam IAS 19 untuk mengatur imbalan kerja. Namun, ada penyesuaian dan interpretasi tambahan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI untuk mempertimbangkan peraturan dan praktik bisnis lokal. Adaptasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan PSAK 24 lebih relevan dan efektif dalam menggambarkan kewajiban imbalan kerja yang sebenarnya, sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dalam beberapa sektor industri tertentu, seperti sektor manufaktur atau jasa keuangan, metode pengukuran manfaat imbalan kerja atau penilaian risiko investasi yang terkait dengan dana imbalan kerja dapat bervariasi untuk mencerminkan karakteristik pasar yang khas.

Pengungkapan dalam laporan keuangan juga penting dalam konteks imbalan kerja, di mana entitas harus memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan tentang kewajiban imbalan kerja yang diakui, asumsi yang digunakan dalam mengukur kewajiban tersebut, serta dampak finansial yang mungkin timbul di masa depan. Informasi ini membantu

pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan dan memahami dampak dari kewajiban imbalan kerja terhadap posisi keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai imbalan kerja dalam IAS 19 dan PSAK 24 menunjukkan komitmen UEA dan Indonesia dalam mengadopsi standar internasional yang relevan sambil mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya serupa, adaptasi lokal diperlukan untuk memastikan bahwa pengakuan dan pengukuran kewajiban imbalan kerja mencerminkan kondisi pasar dan praktik bisnis yang berlaku di masing-masing negara.

6) Peraturan Khusus Sektor

Di UEA, sektor keuangan berbasis Islam memainkan peran penting dalam ekonomi negara, dan untuk mendukung prinsip-prinsip syariah yang mendasari keuangan Islam, ada peraturan akuntansi khusus yang telah disesuaikan dengan IFRS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan dalam sektor ini sesuai dengan aturan syariah, yang meliputi larangan terhadap bunga, spekulasi, dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

IFRS yang disesuaikan dengan syariah memungkinkan entitas keuangan Islam di UEA untuk mematuhi standar akuntansi internasional sambil mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Contoh praktik yang disesuaikan termasuk pengakuan keuntungan dan kerugian berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), penghindaran bunga dalam transaksi, dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Di Indonesia, sementara prinsip dasar IFRS umumnya diadopsi, ada peraturan khusus yang dibuat untuk beberapa sektor spesifik dalam penerapan akuntansi mereka. Misalnya, sektor pertambangan memiliki PSAK yang memberikan panduan khusus tentang pengukuran cadangan mineral, biaya eksplorasi, dan aspek-aspek lain yang unik dalam industri ini. Sebagai contoh lain, sektor perbankan memiliki regulasi yang ketat terkait dengan pengungkapan risiko kredit, kecukupan modal, dan transaksi keuangan kompleks lainnya.

Adaptasi ini penting untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan dalam masing-masing sektor tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga relevan dengan karakteristik industri, risiko yang dihadapi, dan regulasi lokal yang berlaku. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, entitas di Indonesia dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, yang membantu para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi yang informasional dan untuk mengukur kinerja perusahaan secara efektif.

Secara keseluruhan, baik di UEA maupun di Indonesia, adaptasi peraturan akuntansi untuk mencerminkan karakteristik sektor tertentu adalah refleksi dari komitmen untuk mematuhi standar internasional sambil mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal yang berbeda. Hal ini penting dalam mendukung transparansi, kepatuhan, dan pemahaman yang lebih baik terhadap kinerja dan posisi keuangan entitas di pasar global yang semakin terhubung dan beragam.

7) Pemasalahan dan Pembaruan

Di UEA, penerapan standar akuntansi secara langsung mengacu pada standar internasional yang diterbitkan oleh IASB, yaitu IFRS. IFRS dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dan universal dalam penyusunan laporan keuangan di seluruh dunia, memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara entitas dari berbagai negara dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Meskipun UEA secara umum mengadopsi IFRS, adapun penyesuaian yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan lokal atau faktor-faktor khusus yang relevan dengan lingkungan bisnis di negara tersebut. Contohnya adalah penyesuaian yang dilakukan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan berbasis Islam, di mana IFRS dapat disesuaikan untuk

memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah yang melarang bunga dan mempromosikan prinsip bagi hasil.

Di Indonesia, PSAK mengatur standar akuntansi yang relevan dengan prinsip IFRS. PSAK dikeluarkan oleh DSAK-IAI sebagai adaptasi dari IFRS yang mengambil kira kondisi dan keperluan setempat. Pembaruan dalam standar PSAK dapat diterbitkan untuk mengatasi permasalahan spesifik yang muncul dalam praktik akuntansi di Indonesia, seperti perubahan dalam regulasi perpajakan, kebutuhan informasi yang lebih mendalam untuk sektor tertentu seperti pertambangan atau keuangan, atau untuk mempertimbangkan praktek bisnis lokal yang berbeda.

Salah satu contoh pembaruan dalam PSAK adalah PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 (*Leases*) untuk mengatur pengakuan sewa. PSAK 73 mempertimbangkan kondisi ekonomi dan peraturan lokal, serta memberikan panduan tambahan atau interpretasi yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI untuk memenuhi kebutuhan informasi yang khusus di Indonesia.

Perbedaan dalam pendekatan ini mencerminkan upaya masing-masing negara untuk mempertahankan standar akuntansi yang sesuai dengan praktik global sambil mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan lokal. Hal ini penting untuk memberikan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, baik di UEA maupun di Indonesia, adaptasi standar akuntansi internasional menjadi krusial dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja perusahaan dalam lingkungan bisnis yang beragam dan terus berkembang.

KESIMPULAN

Standar akuntansi yang berlaku di Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia, masing-masing mengadopsi IFRS sebagai patokan utama untuk pengungkapan akuntansi. Meskipun demikian, kedua negara melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi lokal mereka, dengan Indonesia menggunakan PSAK sebagai standar akuntansi domestiknya dan UEA menerapkan IFRS langsung. Meskipun ada perbedaan dalam regulasi dan praktik pelaporan keuangan, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam memastikan implementasi yang efektif.

Penelitian ini menghasilkan pemahaman baru tentang penerapan standar akuntansi di UEA dan Indonesia dengan mempertimbangkan perbedaan serta kesamaannya. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi dampak dari variasi ini terhadap kualitas laporan keuangan, tingkat transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai implementasi standar akuntansi di UEA dan Indonesia, terutama dalam memahami dengan lebih baik perbedaan yang ada. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas analisis dengan membandingkan standar akuntansi antara kedua negara dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Christian, N., Angelica, S., & Tanwijaya, R. (2022). Perbandingan antara GAAP Indonesia dan GAAP Italia. *A Journal Management, Business, and Accounting*, 21(2), 149–158.
- Christian, N., Angery, E. Y., Wijaya, E., Dewi, & Septiany, S. (2021). Perbedaan Akuntansi di Indonesia dengan Malaysia serta Analisa Kasus Fraud Transmile Group BHD di Malaysia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(3), 126–143.
- Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Vellin, M. (2023). Perbandingan Praktik Akuntansi Indonesia dan Rusia. *Jurnal Multilingual*, 3(3), 350–367.

- EAAA. (n.d.). Emirates Association for Accountants & Auditors (EAAA). Retrieved June 19, 2024, from <https://aaa4uae.ae/site/>
- Edi, & Santi Yopie. (2019). Management Capability To Produce Quality Earning. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 75–84. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.45>
- Federal Authority UAE. (n.d.). *The Code of Ethics and Professional Conduct*. Retrieved from www.fahr.gov.ae
- IAI. (n.d.-a). IAI. Retrieved June 19, 2024, from <https://web.iaiglobal.or.id/beranda#gsc.tab=0>
- IAI. (n.d.-b). Tentang Kode Etik. Retrieved June 19, 2024, from https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%202021%20-%20Website.pdf
- IAMI. (n.d.). IAMI. Retrieved June 19, 2024, from <https://iamiglobal.or.id/>
- IFRS. (2024). IFRS Accounting Standards Navigator. Retrieved June 19, 2024, from <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/>
- Itan, I., Laudeciska, L., Karjantoro, H., & Chen, R. (2023). Corporate Governance and Environmental Disclosure: Assessing The Role of Environmental Performance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2). Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Nguyen, H. T. T., Nguyen, H. T. T., & Nguyen, C. Van. (2023). Analysis of factors affecting the adoption of IFRS in an emerging economy. *Heliyon*, 9(6), e17331. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17331>
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature Review: Etika Dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Standar, D., Keuangan, A., & Akuntan Indonesia, I. (2022). *Draf Eksposur Pilar Standar Akuntansi Keuangan*. 4. www.iaiglobal.or.id.
- Suprihatin, S., & Tresnaningsih, E. (2013). Dampak Konvergensi International Financial Reporting Standards Terhadap Nilai Relevan Informasi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 171–183. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.09>
- Yuesti, A., & Saitri, P. W. (2021). Akuntansi Internasional. In *Docobook*. <https://docobook.com/akuntansi-internasional16af5621744d81a984fd54eb69f7c5eb1965.html>